

**ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN
KABUPATEN MAGELANG**

***THE ANALYSIS OF EXTENSION PROGRAMME IN
MAGELANG REGENCY***

ASEP RAHMAT



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN KABUPATEN MAGELANG

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ASEP RAHMAT

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS

ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN KABUPATEN MAGELANG

Disusun dan diajukan oleh :

ASEP RAHMAT

Nomor Pokok 0204211514

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 7 Pebruari 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Dr. Suryadi Lambali, MA

Ketua

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Muh. Hatta Jamil, SP. MS

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Roland A. Barkey

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP RAHMAT
Nomor Pokok : P 0204211514
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah
Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Pebruari 2013

Yang Menyatakan,

ASEP RAHMAT

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari dalam penulisan tesis ini adalah hasil dari pengamatan penulis terhadap petani yang ada di Kabupaten Magelang. Meskipun dengan lahan sempit yang mereka kuasai sampai saat ini masih mampu memberikan kontribusi yang besar pada PDRB Kabupaten Magelang dengan berbagai kendala yang mereka hadapi. Dibutuhkan langkah tepat penyuluh sebagai pendamping petani dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui sistem perencanaan penyuluhan. Melalui tulisan ini penulis berusaha untuk menggambarkan mekanisme penyusunan program penyuluhan dan penjabarannya di Kabupaten Magelang.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penulisan ini tapi dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka pada akhirnya tesis ini bisa selesai. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Komisi Penasehat Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA dan Bapak Dr. Muh. Hatta Jamil, SP, MS. yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penulisan tesis. Ungkapan terima kasih ini pula kami sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA, Bapak Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, MS dan Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA. selaku tim

penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan penelitian Tesis ini.

Penulis juga sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bupati Magelang Bapak Singgih Sanyoto, Kepala BKD beserta staf, Kepala BPPKP serta staf tempat penulis melaksanakan tugas, atas perkenan dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan. Juga kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Program Pascasarjana serta pembantu-pembantunya, Direktur PSKMP Universitas Hasanuddin beserta staf fungsional dan Staf Administrasi atas kerjasama dan pelayanan yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi, Ketua Program Studi Perencanaan dan pengembangan Wilayah, Penanggung jawab Konsentrasi Manajemen Perencanaan beserta semua Dosen.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan di BPPKP, koordinator serta penyuluh Kabupaten Magelang, Koordinator dan penyuluh kec. Pakis, Secang dan Tempuran serta rekan-rekan petani yang telah membantu memberikan data dan informasi yang mendukung penulisan tesis ini.

Salam bakti dan hormat kepada Ibunda tercinta Hj. Oon Ronasih dan Ayahanda Bapak H. Karno Suwandi, Bapak dan Ibu Mertua H. Noto Suwito dan Hj. Siti Khotijah beserta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan restu selama Penulis menempuh tugas belajar. Kepada istriku Zaetun dan kedua anaku Julia Nur Azizah dan Ismail Nur

Alam yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati dan senantiasa memberi semangat, motivasi dan pengharapan untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan IX di MKSMP atas bantuan dan kerjasama yang baik serta kebersamaan selama mengikuti pendidikan. Semoga persaudaraan yang sudah terjalin ini kita bisa tetap terjaga selamanya

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, ammiin.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca masih sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Pebruari 2013

ASEP RAHMAT

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian	10
B. Tinjauan Teori dan Konsep	15
1. Teori Sistem	15
2. Konsep Perencanaan	18
3. Penyuluhan dan Dinamika Perkembangannya	26
4. Program Sistem Perencana Dalam Penyuluhan	33

C. Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	56
F. Pengecekan Temuan/ Kesimpulan	57
G. Definisi Operasional	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Magelang	62
1. Posisi Geografis dan Pembagian Wilayah Administratif	62
2. Karakteristik Lahan	65
3. Potensi Ekonomi Wilayah	68
4. Sumberdaya Manusia	81
5. Profil Lembaga Penyuluhan Magelang	83
B. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten Magelang dan Keterkaitannya dengan Programa penyuluhan Provinsi Jateng	88
1. Penyusunan Programa Penyuluhan Desa	94
2. Penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan	102
3. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten	121
4. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah	128
5. Keterkaitan Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2010	131

6. Keterkaitan Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2011	140
7. Keterkaitan Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2012	151
8. Keterkaitan Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	164
C. Penjabaran Programa Penyuluhan Oleh Penyuluh Lapangan di Kabupaten Magelang	166
1. Penjabaran Programa Penyuluhan Menjadi RKTP	168
2. Penjabaran RKTP menjadi Rencana Harian Penyuluh	173
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Programa Penyuluhan	180
1. Faktor Pendukung	181
2. Fakor penghambat	190
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	201
A. Kesimpulan	201
B. Saran-saran	202
DAFTAR PUSTAKA.....	204
Buku.....	204
Peraturan-Peraturan	206

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Keadaan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok di Kabupaten Magelang	5
2. Tipologi partisipasi masyarakat	23
3. Langkah penyusunan program penyuluhan berdasarkan peraturan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan	46
4. Luas wilayah, jumlah desa/ kelurahan per kecamatan Pemkab. Magelang Tahun 2011.....	64
5. Perkembangan fungsi lahan Kabupaten Magelang.....	65
6. Data perkembangan penduduk Kabupaten Magelang	81
7. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan Kecamatan Pakis (2010-2012)	114
8. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan Kecamatan Secang (2010-2012).....	117
9. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan Kecamatan Tempuran (2010-2012)	120
10. Keterkaitan dokumen program penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2010	132
11. Keterkaitan dokumen program penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2010	135
12. Keterkaitan dokumen program penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2010.....	137
13. Kriteria keterkaitan program penyuluhan Kab. Magelang dan Program penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2010	140

14.	Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2011	141
15.	Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2011	144
16.	Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2011	147
17.	Kriteria keterkaitan programa penyuluhan kab. Magelang dan programa penyuluhan kec. Pakis, secang dan tempuran tahun 2011	150
18.	Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2012	151
19.	Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2012	155
20.	Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2012	160
21.	Kriteria keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dan programa penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2012	162
22.	Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kecamatan Secang Tahun 2012	169
23.	Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kec. Pakis Thun 2012.....	171
24.	Penjabaran Dokumen Programa Penyuluhan Kec. Secang dalam RKTP Tahun 2012.....	171
25.	Penjabaran dokumen programa penyuluhan Kec. Pakis dalam RKTP Tahun 2012.....	173
26.	Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Secang Tahun 2012	174
27.	Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Pakis Tahun 2012.....	175

28.	Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Secang Tahun 2012	177
29.	Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Pakis Tahun 2012	178
30.	Anggaran untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kabupaten Magelang.....	188
31.	Panjang jalan menurut keadaannya di Kabupaten Magelang Tahun 2011	189

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Halaman
1. PDRB Kabupaten Magelang menurut sektor lapangan usaha berdasarkan harga konstan (2007 – 2011).....	69
2. PDRB Kabupaten Magelang sektor pertanian berdasarkan harga konstan (2007-2011)	70
3. Perkembangan produksi tanaman bahan makanan utama Kab. Magelang (2007 – 2011)	72
4. Perkembangan produksi sayuran Kab. Magelang (2008 - 2011)	73
5. Perkembangan produksi buah-buahan Kab. Magelang (2007 -2011).....	75
6. Perkembangan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Magelang (2008 - 2011)	77
7. Perkembangan populasi ternak Kab. Magelang (2008 - 2011)	78
8. Perkembangan populasi unggas Kab. Magelang (2008 - 2011)	80
9. Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2011	82
10. Tujuan yang ingin dicapai dalam program penyuluhan Kab.Magelang (2011 – 2012).....	125
11. Keterkaitan program penyuluhan Kab. Magelang dengan program penyuluhan Prov. Jateng Tahun 2011 dan 2012.....	164

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.....	25
2.	Perubahan peranan penyuluh dalam hubungannya dengan pelaku utama.....	30
3.	Alur penyusunan programa penyuluhan dan keterpaduan dengan program pembangunan pertanian.....	44
4.	Alur Penyusunan Programa Penyuluhan dan Keterpaduan dengan Program Pembangunan Perikanan dan kelautan.....	45
5.	Kerangka pikir penelitian.....	51
6.	Posisi wilayah Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah.....	62
7.	Peta Wilayah Kabupaten Magelang dengan Pembagian 21 Kecamatan.....	63
8.	Alur penyusunan programa penyuluhan di Kabupaten Magelang dan keterkaitannya dengan programa Provinsi Jateng.....	89
9.	Alur proses penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh lapangan di Kabupaten Magelang.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang didominasi oleh Industrialisasi di Indonesia dan adanya laju pertumbuhan penduduk banyak berperan dalam alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, akibatnya penyusutan lahan pertanian menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Usaha untuk pencetakan lahan pertanian baru yang selama ini dilakukan pemerintah belum mampu untuk mengimbangi kecepatan penyusutan luas lahan pertanian. Hal ini bisa berakibat pada kapasitas produksi komoditas pertanian terganggu.

Dampak lain dari makin menyusutnya luas lahan pertanian tersebut adalah makin sempit lahan pertanian yang dikuasai oleh petani. Sampai saat ini luas lahan pertanian yang dikuasai petani di pulau Jawa rata-rata hanya 0,3 ha sedangkan menurut Mubyarto (1996) bahwa untuk bisa hidup sejahtera, maka keluarga tani sedikitnya harus menguasai 2 Ha sawah untuk pulau Jawa.

Magelang merupakan satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 108.573 Ha sebesar 71,7% merupakan persawahan dan tegalan. Dengan kondisi seperti ini maka Kabupaten Magelang merupakan daerah dengan karakter agraris.

Hal ini didukung juga dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian yaitu 41,56% (Magelang Dalam Angka 2011) sehingga pertanian sudah menjadi corak kultur masyarakat Magelang.

Potensi pertanian yang cukup besar, menjadikan sektor ini penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang. Menurut analisis data statistik selama 5 tahun (2007 – 2011), kontribusi Lapangan usaha pertanian dalam PDRB rata – rata 29,4%, merupakan kontribusi terbesar dari 9 sektor lapangan usaha yang ada. Sedangkan sektor lapangan usaha lainnya setelah pertanian adalah sektor jasa dengan rata-rata kontribusinya terhadap PDRB mencapai 18,39%.

Besarnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berakibat sempitnya rata-rata lahan yang dikuasai petani. Petani di Kabupaten Magelang rata-rata hanya menguasai 0,3 Ha. Dengan penguasaan lahan yang sempit sangat sulit diharapkan petani sejahtera hanya dengan mengandalkan sektor usaha pertanian. Sektor informal banyak ditempuh petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi ini pun menyebabkan *bargaining position* petani menjadi lemah dalam transaksi perdagangan. Petani biasanya hanya menerima harga jual yang ditentukan sendiri oleh pembeli. Akibat lain dari rendahnya kapasitas produksi adalah rantai perdagangan bisa menjadi lebih panjang, biaya distribusi menjadi semakin tinggi sehingga harga yang harus dibayar

konsumen semakin mahal tapi pendapatan yang diperoleh petani tetap rendah.

Peningkatan produksi perluas lahan yang sama atau produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi produksi tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi keluarga tani. Sampai saat ini produktivitas padi di Kabupaten Magelang di atas rata-rata nasional yaitu 5,97 ton/ha pada tahun 2011(data BPS 2012) sedangkan produktivitas padi tingkat nasional hanya mencapai 5,1 ton/ha. Produktivitas tinggi pertanian di Magelang tidak begitu banyak membantu meningkatkan pendapatan petani karena kecilnya penguasaan lahan pertanian.

Akibat lain dari sempitnya lahan pertanian adalah usahatani menjadi tidak efisien. Dengan lahan sempit akibatnya penggunaan sarana produksi (Saprodi) pertanian seperti pupuk dan pestisida yang diberikan petani menjadi tidak efisien, petani sering tidak mengukur dengan baik proporsi penggunaan pupuk dibanding dengan luas lahan. Selain itu pembelian saprodi ini pun akan jauh lebih mahal karena pembelian dalam jumlah kecil.

Petani pun akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan modal untuk usahatannya apabila memiliki luas lahan yang sempit. Usahatani kecil tidak akan mampu mengakses pinjaman modal dengan bunga untuk usaha komersial karena nilai keuntungan dari sektor ini yang

rendah juga petani umumnya tidak memiliki jaminan asset untuk pinjaman modal.

Kenyataan ini berakibat pada suatu kondisi dimana petani tidak mampu hidup secara layak apabila hanya mengandalkan penghasilan dari usahatani. Maka biasanya petani dan keluarganya melakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan penghasilan dan memanfaatkan waktu luangnya. Petani tidak bisa menggantungkan hidupnya semata-mata pada satu jenis usahatani. Disamping pertanian tanaman pangan sebagai usaha pokok, petani biasanya juga memiliki ternak atau bekerja sebagai buruh bangunan.

Bagaimanapun juga, jika kondisi ini dibiarkan maka pertanian lambat laun akan ditinggalkan oleh petani. Jika ada pilihan lain dalam bekerja maka akan memilih pekerjaan lain yang bisa memberikan penghasilan lebih besar dari pada menjadi petani. Hal ini bisa menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan pengembangan kelembagaan petani seperti kelompok tani, asosiasi petani, koperasi tani dan lain lain. Karena pengetahuan dan wawasan yang ada maka tidak semua petani memiliki kesadaran untuk berorganisasi, bahkan organisasi yang ada pun belum bisa menjadi alat untuk peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran petani untuk mau bergabung

dengan lembaga tani yang ada atau untuk bisa bersama-sama dengan petani lainnya membentuk lembaga petani.

Lembaga petani yang kuat akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan utama yang dihadapi petani. Penyuluh pertanian lapangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mewujudkan hal itu. Tugasnya di lapangan dan bisa bersentuhan langsung dengan petani akan memudahkan untuk memberikan penyadaran dan motivasi pada mereka untuk mengembangkan lembaga petani.

Pada kenyataannya perkembangan kelompok tani di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil yang tidak begitu menggembirakan. Data kelas kelompok tani Kabupaten Magelang pada tahun 2008 dan 2011 tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kelompok tani yang turun kelasnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok di Kabupaten Magelang

No.	KELAS KELOMPOK	2008		2011		Penambahan/ pengurangan (Kelompok)
		JUMLAH (Kelompok)	(%)	JUMLAH (Kelompok)	(%)	
1	Kelas Utama	6	0,3	7	0,4	+1
2	Kelas Madya	91	4,5	67	3,4	-24
3	Kelas Lanjut	766	37,9	733	37,3	-33
4	Kelas Pemula	1.158	57,3	1.159	59,0	+1
Jumlah		2.021	100,0	1.966	100,0	-55

Sumber : Data Kelompok Tani BPPKP Kab. Magelang 2008 dan 2011

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, kelompok tani Kabupaten Magelang menurun dalam jumlah dan kualitasnya. Jumlah kelompok tani yang sebelumnya ada 2.021 kelompok pada tahun 2008, turun menjadi 1.966 kelompok pada tahun 2011. Meskipun ada kenaikan sebanyak 1 kelompok masing-masing kelas utama dan kelas pemula, tapi mengalami penurunan jumlah yang cukup besar pada kelompok tani kelas madya dan lanjut yaitu 24 kelompok kelas madya dan 33 kelompok kelas lanjut.

Kelas kelompok sendiri merupakan pengelompokan/ penggolongan kelompok tani berdasarkan tingkat kemampuan dan kapasitas kelompok. Kelas utama merupakan kelas kelompok yang paling tinggi kemampuan dan kapasitasnya sedangkan kelas pemula merupakan kelas yang paling rendah tingkat kapasitas dan kemampuannya.

Proporsi jumlah kelompok tani pada setiap kelasnya menunjukkan perbedaan yang tidak proporsional. Pada penilaian kelas kelompok tani tahun 2008, kelompok tani banyak berada pada level kelas pemula dengan jumlah lebih dari 50% sedangkan kelas utama yang merupakan kelas paling tinggi hanya kurang dari 0,5%. Kondisi ini tidak begitu banyak berubah ketika dilakukan pendataan kelas kelompok tani pada tahun 2011. Bahkan pada tahun ini dibandingkan tahun 2008 meskipun adanya penambahan satu kelompok tani kelas utama tapi pengurangan jumlah kelompok tani kelas madya dan lanjut jauh lebih besar. Bahkan secara keseluruhan jumlah kelompok tani selama tiga tahun mengalami penurunan/ pengurangan sebanyak 55 kelompok yang berkurang.

Penyuluh merupakan bagian yang sangat strategis dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dialami petani, karena posisinya berada di lapangan sehingga bisa melihat persoalan yang ada lebih spesifik. Solusi yang diberikan oleh penyuluh terhadap persoalan yang ada merupakan solusi yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di wilayah binaannya dan aspek lain yang ada di luar wilayahnya seperti informasi mengenai program dan kebijakan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah desa binaannya ataupun potensi lainnya.

Untuk mewujudkan itu dalam aspek penyuluhan, persoalan tersebut perlu diatasi melalui mekanisme perencanaan penyuluhan yang tepat sehingga solusi yang diambil merupakan solusi terbaik berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada dan dilakukan dengan melibatkan partisipatif aktif dari petani sehingga diharapkan solusi yang diambil merupakan solusi yang tepat yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan setempat.

Programa penyuluhan yang merupakan pedoman kerja bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya selama setahun, disusun secara partisipatif setiap tahun dengan melibatkan seluruh stakeholder dan partisipasi aktif pelaku utama (petani) dan pelaku usaha. Alur penyusunan programa penyuluhan merupakan suatu sistem terpadu dan selaras yang dilaksanakan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana alur penyusunan progama penyuluhan di Kabupaten Magelang dan keterkaitannya dengan programa penyuluhan tingkat Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh lapangan di Kabupaten Magelang ?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat realisasi programa penyuluhan di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui alur penyusunan progama penyuluhan di Kabupaten Magelang dan keterkaitannya dengan programa penyuluhan tingkat Provinsi Jawa Tengah
2. Mengetahui penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh lapangan di Kabupaten Magelang
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasi programa penyuluhan di Kabupaten Magelang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa diraih dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi para pengambil kebijakan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perencanaan penyuluhan pembinaan dan peningkatan kemampuan penyuluh dalam pembinaan petani.

2. Bagi penyuluh

Sebagai masukan dan bahan evaluasi pelaksanaan penyusunan program penyuluhan dan landasan penyempurnaan mekanisme penyusunan program penyuluhan pada masa yang akan datang

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan data untuk bisa mengembangkan dan menyempurnakan lagi hasil penelitian ini pada penelitian selanjutnya

E. Batasan Penelitian

Dengan keterbatasan waktu, biaya dan jangkauan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut

1. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada wilayah kerja penyuluh di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan pertanian merupakan potensi ekonomi wilayah dan sumber mata pencaharian sebagian besar warganya
2. Analisis dokumen dibatasi pada dokumen perencanaan, evaluasi, laporan-laporan dan dokumen pendukung lainnya selama 3 tahun (2010 - 2012).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan objek penelitian penyuluh dan lembaga penyuluhan adalah :

1. Penelitian Istiningsih (2008)

Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul di Era Otonomi Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman, dan Bantul yang mempunyai kebijakan berbeda dalam mengatur kelembagaan yang menaungi keberadaan penyuluh pertanian di daerah masing-masing dan jika ditinjau berdasarkan perannya sebagai penyedia jasa pendidikan, motivator gerak usaha agribisnis, konsultan atau penasehat pertanian, dan pendamping petani mandiri.
- 2) untuk mengetahui seberapa jauh signifikansi perbedaan kinerja penyuluh pertanian di empat kabupaten tersebut, jika ditinjau berdasarkan perannya sebagai penyedia jasa pendidikan, motivator gerak usaha tani, konsultan atau penasehat pertanian,

dan pendamping petani yang profesional dan mandiri serta jika ditinjau berdasarkan pengetahuan, sikap peran, dan keterampilan perannya sebagai penyuluh pertanian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Bantul dan Kulonprogo, yang tidak berbeda secara signifikan (sama), dan keduanya sama-sama di bawah naungan BIPP, ternyata memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada penyuluh pertanian di Gunungkidul yang berada di bawah naungan beberapa UPTD, maupun di Sleman yang langsung berada di bawah Dinas.
- 2) Penyuluh pertanian yang tetap berada di bawah naungan BIPP ternyata memiliki kinerja yang lebih baik daripada penyuluh pertanian yang berada di bawah naungan beberapa UPTD yang dibedakan secara sektoral maupun yang berada langsung di bawah dinas.

2. Penelitian dari Aginta Marlina (2011)

Evaluasi Program Penyuluhan Yang Mendukung Usaha Tani di Kecamatan Pancur Batu (Studi kasus: WKPP Namorih dan Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu), tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan pertanian yang ada di daerah penelitian.
- 2) Untuk mengetahui keberhasilan program penyuluhan pertanian yang ada di daerah penelitian.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh jarak WKPP (wilayah kerja penyuluh pertanian) terhadap pelaksanaan program penyuluhan di daerah penelitian.
- 4) Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di daerah penelitian.
- 5) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di daerah penelitian.

Hasil penelitian :

- 1) Program penyuluhan pertanian di WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) Namorih dan Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang merupakan perpaduan antara program dari pemerintah dan masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada.
- 2) Pelaksanaan program telah dapat dikategorikan berhasil pada tiap-tiap indikator pelaksanaan. Pada indikator konteks (context) persentase ketercapaian sebesar 82,59 % dengan nilai 7,5. Pada indikator masukan (input) persentase ketercapaian yang diperoleh sebesar 84,81 % dengan nilai 7.66. Pada indikator proses (process) persentase ketercapaian sebesar 80 % dengan nilai 7.2. Pada indikator produk (product) persentase ketercapaian sebesar 83.70 % dengan

nilai 7.53. Nilai tingkat keberhasilan program penyuluhan di daerah penelitian adalah 28.98 dengan persentase ketercapai sebesar 80.05%.

- 3) Jauh dekatnya jarak WKPP yang ditempuh oleh penyuluh tidak mempengaruhi penyuluh dalam menjalankan tugasnya untuk tetap membantu petani.
- 4) Masalah-masalah yang dihadapi penyuluh di daerah penelitian biasanya muncul dari masalah yang dihadapi oleh petani. Masalah tersebut meliputi kelangkaan pupuk, lemahnya permodalan, hama dan penyakit yang menyerang serta rendahnya harga hasil produksi pertanian. Selain itu masih kurangnya kesadaran petani untuk dapat menerima anjuran teknologi yang diberikan oleh penyuluh.
- 5) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah di daerah penelitian adalah petani melalui GAPOKTAN bekerja sama dengan penyuluh pertanian untuk mengajukan permohonan pupuk bersubsidi serta benih unggul yang cukup dan untuk membahas masalah modal, petani dapat meminjam uang dari Bank atau lembaga keuangan yang ada di daerah penelitian serta mengelola dana PUAP yang telah diberikan pemerintah.

3. Penelitian dari Herawati (2005),

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kontak tani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian.

Tujuan penelitian :

- 1) Menentukan tingkat partisipasi kontak tani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian.
- 2) Menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi kontak tani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian

Hasil penelitian :

- 1) Tingkat partisipasi kontak tani tinggi dalam kehadiran, sedangkan tingkat mengajukan saran serta diterimanya saran kategori sedang karena memiliki keterbatasan dalam mengemukakan pendapat.
- 2) Faktor internal yang berhubungan secara nyata dengan tingkat partisipasi dalam kehadiran yaitu pengalaman sebagai kontak tani, adanya pekerjaan sampingan, frkuensi komunikasi dan tingkat pendapatan. Tingkat partisipasi dalam mengajukan saran adalah pendidikan formal, pengalaman sebagai kontak tani dan kekosmopolitan. Intensitas penyuluhan berhubungan secara nyata dengan tingkat partisipasi dalam kehadiran dan ikut serta dalam lembaga berpengaruh nyata dengan tingkat partisipasi dalam kehadiran, mengajukan saran dan diterimanya saran.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Sistem

Istilah system berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mempunyai pengertian :

- Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak pengertian (*“whole compounded of several parts”* – Shrode dan Voich, 1974:115)
- Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*“an organized, functioning relationship among units or components”* – Awad, 1979:4)

Jadi dengan kata lain istilah “systema” atau sistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).

Sistem digolongkan dalam dua golongan pemakaian, yang menuju pada suatu “entitas” wujud benda dan sebagai suatu metode atau tata cara. Mengutip pandangan dari Shrode dan Voich (1974:121):

The term “system” has two important connotations which are implicit, if not explicit, in almost any discussion of system as a plan, method, device, or procedure for accomplishing something. As well see, these two notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to each.

Istilah “Sistem” memiliki dua konotasi penting baik secara implisit atau pun eksplisit, dalam beberapa diskusi tentang sistem sebagai suatu perencanaan, metode, alat, atau prosedur untuk mencapai sesuatu. Seperti yang terlihat, ada dua gagasan yang tidak jauh berbeda, karena keteraturan atau adanya struktur keduanya merupakan hal yang mendasar.

Jadi secara singkatnya, menurut kedua pengarang tersebut istilah sistem itu menunjukkan pada dua hal, yaitu pada suatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada satu rencana, metode, alat atau tata cara untuk mencapai sesuatu. Tapi kedua pengertian tersebut tidaklah mempunyai perbedaan yang berarti karena keteraturan, ketertiban atau adanya struktur itu merupakan hal yang mendasar/fundamental bagi keduanya.

Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem (*system approach*). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah. Atau menerapkan “kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu” di dalam memandang atau menghadapi kesaling terhubungkannya sesuatu benda, masalah atau peristiwa. Jadi, pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai suatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.

Ciri Pokok Sistem

Menurut Amirin (2010:21) ciri pokok sistem yang dia sadur dari berbagai macam literatur adalah :

1. Setiap sistem mempunyai tujuan

2. Setiap sistem mempunyai batas (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungannya
3. Walau mempunyai batas, akan tetapi sistem tersebut bersifat terbuka dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya
4. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang disebut pula sebagai bagian, unsur, atau komponen.
5. Mempunyai sifat *wholism* atau satu kebulatan yang utuh dan padu antara berbagai bagian, komponen atau unsur.
6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan di dalam (intern) sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya
7. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Maka sistem sering disebut sebagai “processor” atau “transformator”.
8. Dalam sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik.
9. Dengan adanya sistem kontrol tersebut maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatis (dengan sendirinya).

Jika mereka yang terlibat dalam pemecahan masalah tetap berpikiran terbuka dan menggunakan, pendekatan terbuka multi-sistem, kita bisa mendapatkan keuntungan dari perspektif keahlian orang lain. Kadang-kadang, bagaimanapun, beberapa menggunakan sistem tertutup, pendekatan, kaku dogmatis masalah kompleks dengan pandangan

bahwa kebenaran mutlak dan prediktabilitas ada. Meskipun solusi sederhana untuk masalah kompleks yang awalnya menyenangkan, mereka mencegah kita dari untuk kompleksitas penuh yang terbuka dari setiap masalah yang diberikan dan dapat menyebabkan masalah yang bahkan lebih kompleks.

2. Konsep Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan (Kelly dan Backer, 2000 dalam Rustiadi et al, 2009). Sebagian kalangan berpendapat (Rustiadi et al, 2009) bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan tahapan-tahapan untuk mencapainya.

Dengan demikian, proses perencanaan, dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidak pastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian

memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya (Kay dan Alder, 1999 dalam Rustiadi et al, 2009). Dari semua definisi yang ada dalam perencanaan, selalu terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yaitu :1) Unsur hal yang ingin dicapai dan 2) unsur cara untuk mencapainya

Perencanaan adalah proses aplikasi pengetahuan (baik ilmiah maupun teknikal) kedalam tindakan praktis (Friedmann, 1987 dalam Salman, 2009) agar perubahan yang berlangsung sesuai dengan visi tatanan. Dengan pengertian ini, proses mempengaruhi perubahan melalui tindakan praktis agar sesuai dengan visi dapat berlangsung pada dua aras: (1) melalui "arahan pemerintah terhadap sistem kemasyarakatan" (*societal guidance*); (2) melalui "dorongan transformasi dari dalam masyarakat" (*social transformation*) (Friedmann, 1987 dalam Salman, 2009). Saling interkasi antara arahan masyarakat dan transformasi sosial inilah yang selalu mewarnai kompleksitas perencanaan, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Arahan kemasyarakatan (*societal guidance*) dilakukan melalui dua bentuk aplikasi pengetahuan, yakni melalui reformasi sosial (*social reform*) pada formatnya yang radikal dan melalui analisis kebijakan (*policy analysis*) pada formatnya yang moderat. Transformasi sosial (*social transformation*) juga dilakukan dalam dua bentuk aplikasi pengetahuan, yakni melalui mobilisasi sosial (*social mobilization*) pada formatnya yang

radikal dan melalui pembelajaran sosial (*social learning*) pada formatnya yang moderat.

b. Perencanaan Rasional-Partisipatif

Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau bisa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006:38)

Dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pengetahuan yang “sempurna” (sebagaimana dituntut dalam perencanaan rasional) di manapun juga hampir tidak pernah tercapai. Akibat dari tidak dicapainya reformasi yang komprehensif adalah kegagalan dalam mengidentifikasi masalah yang ada (tahap pertama dalam perencanaan rasional).

Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah dapat disebabkan akibat pendekatan dan cara berfikir (*top down*), di mana para perencana dan para pengambil keputusan melakukan interpretasi dan pengukuran secara satu arah tidak melalui proses dialogis yang interaktif bersama para pihak terkait (*stake holders*). Terkait dengan hal ini, Dalal Clayton dan Dent (2001) dalam Rustiad,et al (2009) menyatakan bahwa penyebab dari kegagalan perencanaan yang bersifat *top down* adalah :

- 1) Kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat
- 2) Kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya data secara memadai
- 3) Kegagalan menyatukan upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/proyek yang ada,
- 4) Kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya institusi yang ada secara memadai
- 5) Kegagalan mempersatukan visi seluruh *stakeholders*

Terkait dengan masalah kegagalan informasi, Dalal-Clayton dan Dent (2001) mempertegas tiga situasi penyebab kegagalan informasi yang banyak di temui di negara-negara yang belum berkembang, yaitu :

- 1) Tidak ada data
- 2) Data yang relevan tersedia tapi pengambil keputusan tidak tahu atau tidak ada akses
- 3) Data tersedia tapi tidak komprehensif

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dapat menutupi berbagai kelemahan pendekatan perencanaan rasional terutama kelemahan akibat terbatasnya informasi yang berdampak serius pada terjadinya *bounded rationality*. Membangun partisipasi seluruh *stakeholders* akan dapat memenuhi sifat komprehensifnya suatu

perencanaan yang lengkap dan dapat dipahami bersama guna membangun keputusan yang terbaik.

Salah satu tahapan perencanaan rasional-partisipatif (dalam Rustiadi, et al, 2009) adalah pengumpulan data, social assesment, analisis masalah, menetapkan tujuan-tujuan, mengidentifikasi alternatif-alternatif, mengidentifikasi/ investigasi hambatan dan peluang, memilih alternatif terbaik (*decision making*), implementasi, dan monitoring serta evaluasi.

Pengertian partisipasi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keikut-sertaan, turut serta dalam kegiatan. Sedangkan menurut Bornby (1974), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat (Webster,1976). Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969).

Ada tujuh tipe partisipasi hasil identifikasi dari Bass et al (Hobley, 1996) dalam Mardikanto (2009) seperti yang bisa kita lihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tipologi partisipasi masyarakat

No.	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
1	Partisipasi pasif/ manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi - Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat - Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran
2	Partisipasi informatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian - Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian - Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat
3	Partisipasi konsultatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi - Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya - Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama - Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan - Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti
4	Partisipasi insentif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memberikan korbanan/ jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/ ubah - Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan - Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan
5	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek - Pembentukan kelompok (biasanya) biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati - Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya
6	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau

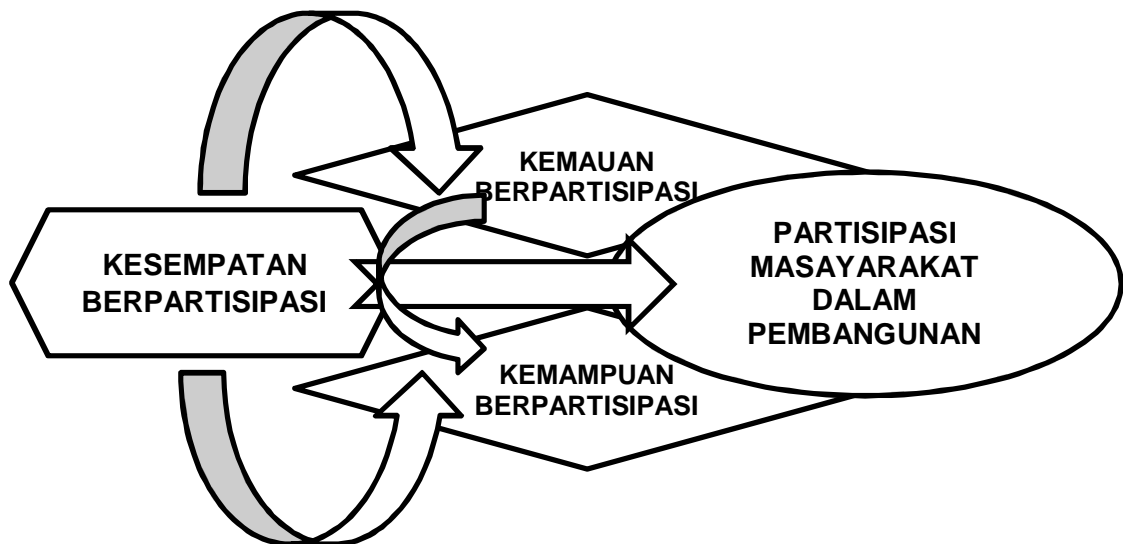
Lanjutan Tabel 2.

No.	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
		penguatan kelembagaan - Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis - Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan
7	Self Mobilization (mandiri)	- Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. - Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan - Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

Sumber : *Sistem Penyuluhan Pertanian, Totok Mardikanto (2009)*

Kesulitan dalam penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat menurut Mardikanto (2009) disebabkan karena beberapa hal, yaitu : Pengembangan partisipasi akan menghilangkan hak-hak keistimewaan (*Previllage*) atau perbedaan status sosial yang biasanya dimiliki oleh kelompok “elite” tertentu di daerah. Disamping itu ada juga persepsi yang menilai “masyarakat sulit diajak maju”. Padahal hal itu menurut White (1978) dalam Mardikanto (2009) menunjukkan tidak memahami karakter masyarakat. Pada lain sisi kesulitan dalam penumbuhan partisipasi tersebut disebabkan karena terlalu lama *direkayasa untuk tidak terlalu berfikir* oleh pihak penguasa. Sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/ diinstruksikan,

dibanding harus ikut susah-susah berfikir merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.



Gambar 1. Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

Sumber : Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Menurut Slamet, M (1985) tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Kesempatan yang diberikan pada masyarakat merupakan pendorong tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Meskipun sudah diberikan

kesempatan kalau masyarakat masih belum memiliki kemauan dan kemampuan karena banyak faktor penghambat seperti yang telah disebutkan di atas maka sulit kita mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Penyuluhan dan Dinamika Perkembangannya

a) Sejarah Penyuluhan di Dunia

Penyuluhan diawali dengan ceramahnya James Stuart dari Trinity College di Inggris yaitu sekitar tahun 1867-68 pada perkumpulan pekerja wanita dan pria di Inggris Utara. Istilahnya pada saat itu adalah “extension university”. Stuart kemudian dianggap sebagai bapak penyuluhan. (Van Den Ban, 2005) .

Pada tahun 1871, Stuart mengusulkan pada University of Cambridge agar penyuluhan dijadikan mata kuliah dan secara resmi universitas ini menerapkan sistem penyuluhan pada tahun 1873. Hal ini diikuti selanjutnya oleh London University (1876) dan Oxford University (1878).. Menjelang Tahun 1880 kegiatan ini telah merupakan gerakan penyuluhan tempat perguruan tinggi melebarkan sayapnya ke luar kampus (Van Den Ban, 2005).

Penyuluhan pertanian masuk ke Amerika Serikat pada awal 20 ketika *Cooperative Extension Services* mengembangkan *Land Grant College* (Mardikanto, 2009). Di sini penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan orang dewasa yang menempatkan pengajar

sebagai staf universitas. Pada saat ini sebagian besar negara yang berbahasa Inggris menggunakan istilah-istilah Amerika untuk kata 'penyuluhan'. Tujuan penyuluhan bagi mereka adalah menjamin agar peningkatan produksi pertanian yang merupakan tujuan utama kebijakan pertanian dicapai dengan cara merangsang petani untuk memanfaatkan teknologi produksi modern dan ilmiah yang dikembangkan melalui penelitian.

b) Sejarah Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Menurut Prof. Iso Hadiprojo kelahiran penyuluhan di Indonesia bertepatan dengan kelahiran Departemen Pertanian pada tahun 1905, yang antara lain memiliki tugas melaksanakan penyuluhan pertanian. Sebelum tahun 1905 kegiatan "penyuluhan" lebih berupa pemaksaan-pemaksaan yang dilaksanakan dalam rangka "Tanam paksa". Hal ini bertentangan dengan hakikat penyuluhan itu sendiri (Mardikanto, 2009).

Kehadiran penyuluhan di Indonesia yang lebih dari seabad, kehadirannya sebagai ilmu tersendiri baru pada tahun 60'an dengan dikenalkan melalui Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). Sedangkan di Perguruna Tinggi, ilmu penyuluhan baru dikembangkan sejak tahun 1976 yaitu sejak dibukanya jurusan Penyuluhan Pertanian pada Program Pasca Sarjana IPB. Sedangkan untuk S1, program studi penyuluhan dan Komunikasi pertanian baru dibuka pada tahun 1998.

c) Pengertian Penyuluhan Pertanian

Mardikanto (2009) menyimpulkan pemahaman kegiatan penyuluhan yang bersumber dari beberapa literatur, yaitu :

1) Penyuluhan sebagai penyebaran (informasi)

Merupakan terjemahan dari “extension” yang bisa diartikan sebagai penyebaran. Dalam hal ini penyebaran informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian ke dalam praktek atau kegiatan praktis.

2) Penyuluhan sebagai Proses Penerangan/ penjelasan

Penyuluhan asal kata dari “suluh” atau obor, merupakan terjemahan dari kata “voorlichting” yang bisa diartikan sebagai penerangan atau memberikan terang dalam kegelapan sehingga bisa diartikan pula sebagai kegiatan penerangan

3) Penyuluhan sebagai Proses Perubahan perilaku

Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yagn disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (*behaviour*) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang seseorang yang dapat diamati oleh orang/ pihak lain, baik secara langsung (berupa : ucapan, tindakan, bahasa tubuh dll.) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

4) Penyuluhan sebagai Proses Perubahan sosial

Penyuluhan tidak hanya perubahan perilaku tapi juga proses perubahan sosial, seperti perubahan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya (demokratisasi, transparansi, supremasi hukum dll.)

5) Penyuluhan Proses Rekayasa sosial (*Social engineering*)

Penyuluhan sering disebut sebagai proses rekayas sosial (*social engineering*) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosial masing-masing.

6) Penyuluhan sebagai Proses pemasaran sosial (*Social Marketing*)

Dalam pengertian ini penyuluhan dalam proses pembentukan masyarakat seperti yang dikehendaki perekayasa/ penyuluh dengan “menawarkan” pada masyarakat dan keputusan untuk menerima atau menolak merupakan hak penuh masyarakat itu sendiri

7) Penyuluhan sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Inti kegiatan penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat (Margono, 2000). Artinya memberi daya pada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan

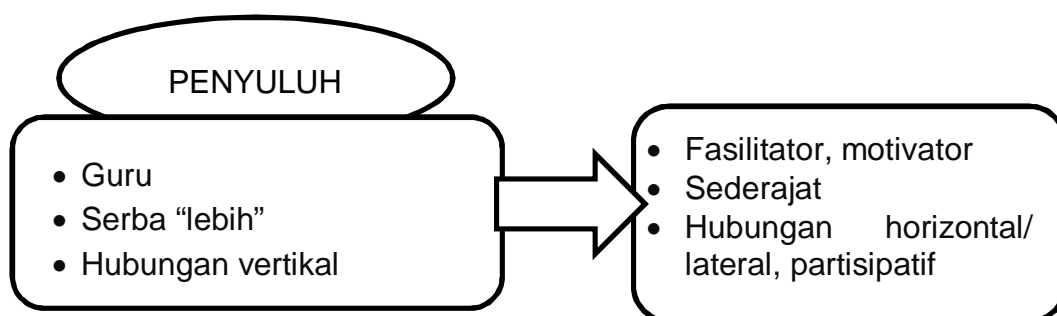
8) Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas (*Capacity Strengthening*)

Penguatan kapasitas artinya penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan.

9) Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan

Proses penyuluhan yang menyampaikan pesan pembangunan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Saragih, B (2002), perlu ada redefinisi yang menyangkut pengertian “penyuluhan” seiring dengan adanya perubahan kehidupan masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian baik menyangkut konteks atau pun kontennya. Perubahan yang terjadi dalam penyuluhan seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.



Gambar 2. Perubahan peranan penyuluh dalam hubungannya dengan pelaku utama

Sejalan dengan perubahan peranan penyuluh seperti yang diilustrasikan pada gambar 2, menurut Fatah, L (2007) peranan penyuluh harus lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan

menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekwensi masing-masing pilihan itu. Dengan demikian maka penyuluh harus berperan sebagai pendamping dan pembimbing petani/ masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya mereka. Penyuluh menjadi fasilitator bagi petani dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Peranan dan partisipasi petani sebagai penerima manfaat makin besar baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Berbeda dengan sistem penyuluhan pada masa lalu, di mana petani harus mengikuti keinginan dari penyuluh baik dengan suka rela atau pun terpaksa.

Melalui pengertian ini menurut Mardikanto (2009), penyuluhan tidak terbatas pada pengertian terbentuknya *“better farming, better business, and better living”* tetapi lebih jauh dari itu penyuluh memfasilitasi petani untuk bisa mengadopsi teknologi produksi dan kemudahan pemasaran untuk peningkatan pendapatan. Melalui penyuluhan pula petani bisa memiliki posisi tawar yang baik dalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak pada petani.

Dengan adanya pergeseran posisi penyuluh yang berkaitan juga dengan adanya pergeseran pola pembangunan sektor pertanian maka perlu adanya redefinisi pengertian penyuluhan. Dalam UU no. 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah :

Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Mardikanto (2009), penyuluhan pertanian adalah suatu system pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan/ keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/ masyarakatnya. Sedangkan menurut AW.Van den Ban dan Hawkins (1999), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Efektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan menurut Mardikanto (2009) dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku (petani) sasarannya, baik yang menyangkut : pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya. Yang kesemuanya itu dapat diamati pada :

- Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup macam dan jumlah sarana produksi, serta peralatan/mesin yang digunakan, maupun cara-cara atau teknik bertaninya.
- Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya.

- Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan dari usaha taninya.

Menurut Hafsah (2006), bahwa efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan diperhatikan oleh subsistem yang lain, atau mampu mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis. Dalam banyak hal kasus, terlihat bahwa keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh perhatian pengusaha atau pimpinan wilayah setempat.

4. Programa Sistem Perencana Dalam Penyuluhan

Programa adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk dan sistematika yang teratur. Program dapat dihasilkan melalui proses perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan (Priyono, 2009).

Program dapat dihasilkan melalui proses perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih kriteria yang terbaik dalam mencapai tujuan. Rencana kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat secara lengkap tentang apa, mengapa, bagaimana, siapa, bilamana, dimana, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. (Mardikanto dan Sutarni, 1990).

Definisi program penyuluhan menurut Kementerian Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan (Permentan, no.25, 2009). Berdasarkan definisi di atas, program yang khusus dan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan disebut program penyuluhan.

Dalam Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan (UU SP3K) nomor 16 tahun 2006 pasal 1 ayat 23, dikatakan :

“Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan”.

Dari beberapa definis dan pengertian-pengertian tentang “perencanaan Program” (Mardikanto, 2009), disimpulkan beberapa pokok-pokok pikiran yang meliputi :

- 1) Perencanaan program merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki.
- 2) Perencanaan program, dirumuskan oleh banyak pihak. Artinya, dirumuskan oleh penyuluh bersama-sama masyarakat penerima manfaatnya dengan didukung oleh para spesialis, praktisi dan penentu

kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat.

- 3) Perencanaan program, dirumuskan berdasarkan fakta (bukan dugaan) dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan.
- 4) Perencanaan program, meliputi perumusan tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu.
- 5) Perencanaan program, dinyatakan secara tertulis. Artinya, perencanaan program merupakan perencanaan tertulis tentang : keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

Program penyuluhan yang baik sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut (sistem *bottom up*). Pemerintah harus mengetahui yang menjadi kebutuhan masyarakat lalu kemudian menentukan program apa yang cocok dilakukan di daerah tersebut.

Partisipasi petani/ pelaku utama dalam penyusunan program penyuluhan merupakan suatu hal yang penting. Menurut Van den Ban (2005) ada beberapa alasan pentingnya kenapa hal ini harus dilakukan :

- 1) Petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta

pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan serta struktur sosial masyarakat mereka.

- 2) Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggung di dalamnya.
- 3) Masyarakat yang demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yang terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai.
- 4) Banyak persoalan pembangunan pertanian, seperti pengendalian erosi tanah, pengembangan sistem usahatani yang lestari dan pengembangan agribisnis tidak bisa dipecahkan dengan keputusan satu pihak diperlukan keputusan kolektif dengan partisipasi kelompok sasaran.

Menurut Mardikanto (2009), untuk mengukur sampai sejauh mana perencanaan program yang baik, beberapa acuan yang bisa digunakan untuk itu adalah :

1. Analisis fakta dan keadaan

Menyajikan fakta dan data yang lengkap yang menyangkut keadaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, ketersediaan sarana/ prasarana, dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan dan stabilitas politik.

2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan

Perumusan masalah dipusatkan pada masalah-masalah yang nyata (*real problems*) yang telah dirasakan masyarakat (*felt- problems*).

Artinya , perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata (*real needs*) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (*felt needs*) oleh mereka.

3. Jelas dan menjamin keluwesan

Jelas dan tegas tidak menimbulkan keragu-raguan atau kesalah-pengertian dalam pelaksanaannya. Harus luwes (memberikan peluang untuk dimodifikasi) jika tidak maka program tersebut tidak bisa dilaksanakan.

4. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan

Tujuan menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan, setelah tujuan program tersebut tercapai.

5. Menjaga keseimbangan

Mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan bukannya sekelompok kecil masyarakat saja. Setiap pengambilan keputusan harus ditekankan pada kebutuhan yang paling diutamakan yang mencakup orang banyak. Efisiensi, diarahkan demi pemerataan kegiatan dan waktu pelaksanaan harus dihindari kegiatan-kegiatan yang terlalu besar menumpuk pada penyuluh atau pada masyarakat penerima manfaat.

6. Pekerjaan yang jelas

Jelas dalam prosedur, tujuan dan sasaran kegiatan yang mencakup :

- Masyarakat penerima manfaat
- Tujuan, waktu dan tempatnya
- Metode yang digunakan
- Tugas dan tanggung jawab pihak yang terkait
- Pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel
- Ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya

7. Proses yang berkelanjutan

Perumusan masalah, pemecahan masalah dan tindak lanjut (kegiatan yang harus dilakukan) pada tahap berikutnya, harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

8. Merupakan proses belajar mengajar

Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi harus mendapat kesempatan “belajar” dan “mengajar”. Artinya, masyarakat diberi kesempatan belajar mengumpulkan fakta dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara pemecahan masalahnya. Sebaliknya, penyuluh dan aparat pemerintah yang lain harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai upaya belajar dari pengalaman masyarakat setempat.

9. Merupakan proses koordinasi

Perumusan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan, harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak dalam masyarakat.

10. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (built in) dalam perencanaan program

Dari kesepuluh pokok ukuran tersebut, secara ringkas dapat dikemukakan beberapa karakteristik perencanaan program yang baik, yang meliputi :

- 1) Mengacu pada kebutuhan masyarakat
- 2) Bersifat komprehensif
- 3) Luwes
- 4) Merupakan proses pendidikan
- 5) Beranjak dari sudut pandang masyarakat
- 6) Memerlukan kepemimpinan lokal yang handal
- 7) Menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi
- 8) Mengharapkan partisipasi masyarakat, agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri, dan
- 9) Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan

Manfaat dari disusunnya program dan rencana kerja penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin adanya pertimbangan yang mantap tentang apa dan mengapa hal itu harus dilakukan.
- 2) Adanya pernyataan tertulis (dokumen) yang dapat digunakan setiap saat sebagai pedoman kerja bagi pelaksana penyuluhan, sehingga dapat mencegah terjadinya salah pengertian, serta memberikan pedoman bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi penyuluhan.
- 3) Memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran penyempurnaan.
- 4) Dengan adanya tujuan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kemajuan, maka dapat dikaji seberapa jauh saran penyempurnaan dapat diterima atau ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai.
- 5) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dicapai yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.
- 6) Memberikan jaminan kelangsungan pelaksanaan program meskipun ada pergantian personalia.
- 7) Ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan akan membantu meningkatkan kepercayaan diri petani dan kepemimpinannya.
- 8) Ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan penyuluhan merupakan pengalaman yang bersifat pendidikan
- 9) Membantu mengembangkan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

10) Meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyuluhan secara keseluruhan, seperti sumber daya, waktu dan tenaga (Priyono, 2009).

Mardikanto (2009), menambahkan arti penting perencanaan program penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya
- 2) Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat (umum). Diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian (dibandingkan dengan pernyataan tidak tertulis) dan dapat dikaji ulang (dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama dan sesudah program tersebut dilaksanakan.
- 3) Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/ saran penyempurnaan yang “baru”.
- 4) Dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan revisi tersebut dapat diterima/ ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai, baik dalam arti : jumlah, mutu dan waktu yang telah ditetapkan
- 5) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.
- 6) Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang :
 - a. Kepentingannya dari masalah-masalah insidental (yang dinilai akan menuntut perlunya revisi program), dan

- b. Pemantaban dari perubahan-perubahan sementara (jika memang diperlukan revisi program
- 7) Mencegah kesalah-artian tentang tujuan akhir, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan
 - 8) Memberikan kelangsungan dalam diri personel, selama proses perubahan berlangsung. Artinya, setiap personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi program selalu merasakan perlunya kontinuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan
 - 9) Membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
 - 10) Menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, waktu) dan merangsang efisiensi pada umumnya
 - 11) Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat

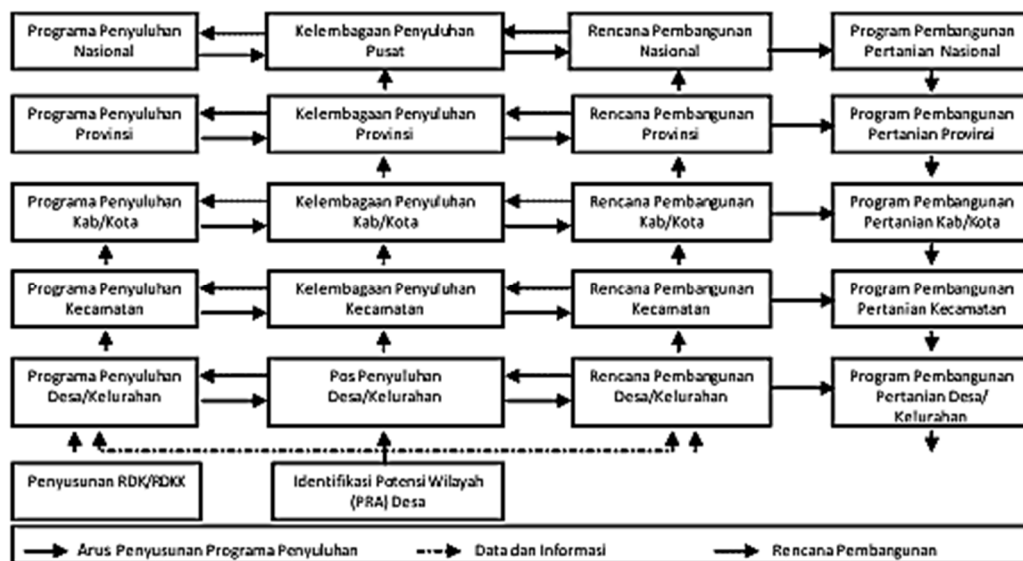
Mekanisme penyusunan program

Mekanisme penyusunan program penyuluhan (Permentan, no. 25, tahun 2009) merupakan sistem yang saling terkait dengan program dan kegiatan yang lain oleh karena itu dalam pedoman penyusunan program pertanian dikatakan :

- Penyuluhan pertanian terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan pertanian. Dengan demikian proses penyusunan

programa penyuluhan dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian.

- Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan.
- Penyusunan programa penyuluhan dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang tercantum pada programa penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan APBN.
- Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan agar programa penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung.

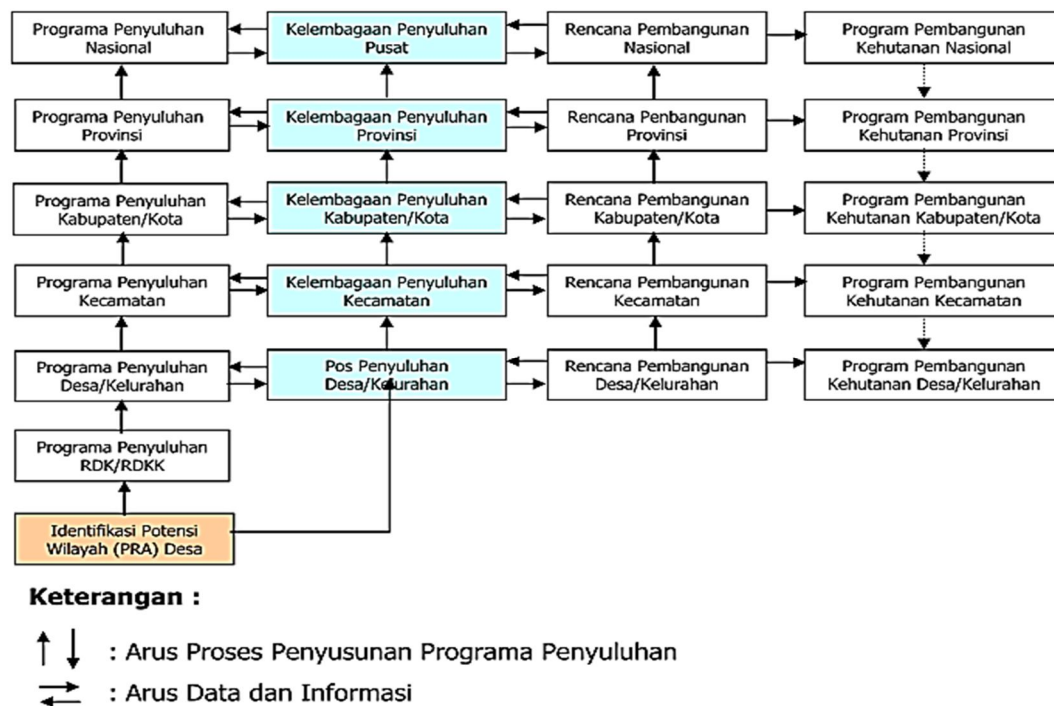


Gambar 3. Alur penyusunan programa penyuluhan dan keterpaduan dengan program pembangunan pertanian

Sumber : Pedoman Penyusunan Programa penyuluhan Pertanian (Permentan 25 tahun 2009)

Ada perbedaan alur penyusunan programa penyuluhan menurut pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2011 dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, bisa dilihat pada Gambar 4.

Perbedaan yang ada yaitu dalam alur penyusunan programa dari kementerian perikanan dan kelautan dari tingkat desa sampai tingkat pusat tidak terputus pada tingkat kabupaten dan provinsi sedangkan pedoman kementerian pertanian terputus. Tapi perbedaan tersebut bukan hal yang prinsip karena dalam UU SP3K tahun 2006 hanya mengamanatkan harus “sejalan”.



Gambar 4. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan dan Keterpaduan dengan Program Pembangunan Perikanan dan kelautan

Langkah-langkah penyusunan programa penyuluhan

Program penyuluhan merupakan hasil dari berbagai langkah yang harus dipahami dan dilaksanakan secara logis. Mardikanto (2009) merumuskan langkah-langkah penyusunan programa penyuluhan berdasarkan model-model yang ada adalah :

- 1) Pengumpulan data keadaan
- 2) Analisis dan evaluasi fakta-fakta
- 3) Identifikasi masalah
- 4) Pemilihan masalah yang ingin dipecahkan
- 5) Perumusan tujuan-tujuan dan atau penerima manfaat

- 6) Perumusan alternatif pemecahan masalah
- 7) Penetapan cara mencapai tujuan (rencana kegiatan)
- 8) Pengesahan programa penyuluhan
- 9) Pelaksanaan kegiatan
- 10) Perumusan rencana evaluasi
- 11) Rekonsiderasi

Langkah-langkah penyusunan progama penyuluhan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan programa penyuluhan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Perikanan dan Kelautan tidak jauh berbeda dan hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mardikanto (2009). Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini bisa dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. Langkah penyusunan programa penyuluhan berdasarkan peraturan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan

No	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/ Permentan/OT. 140/ 5/2009	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesi Nomor : P. 41/Menhut-II/2010	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/ MEN/ 2011
1	Perumusan Keadaan	Perumusan Keadaan	Perumusan keadaan
2	Penetapan Tujuan	Penetapan Tujuan	Penetapan masalah;
3	Penetapan Masalah	Penetapan Masalah	Penetapan tujuan;
4	Penetapan Rencana Kegiatan 1. Rencana kegiatan penyuluhan 2.Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan	Penetapan Rencana Kegiatan 1. Rencana kegiatan penyuluhan 2. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan	Penetapan cara mencapai tujuan;
5	Rencana Monitoring dan Evaluasi	Rencana Monitoring dan Evaluasi	Rencana monitoring dan evaluasi;
6	Revisi Programa Penyuluhan	Revisi Programa Penyuluhan	Revisi programa penyuluhan perikanan.

C. Kerangka Pemikiran

Rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar petani di Magelang disebabkan banyak faktor seperti sempitnya lahan yang dikuasai petani, lemahnya posisi tawar petani, tidak efisiennya dalam pengelolaan usahatani, lemahnya daya saing komoditi pertanian, lemahnya dalam akses modal dan rendahnya kapasitas SDM petani. Pada sisi lain kelompok tani yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang kurang berarti.

Melihat kompleksnya persoalan pada petani di Kabupaten Magelang, memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Salah satunya adalah lembaga penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yaitu BPPKP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan). BPPKP merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan sektor pertanian peternakan, perikanan dan kehutanan dari aspek pengembangan SDM petani dan kelembagaan petani.

UU SP3K nomor 16 tahun 2006, mengamanatkan tentang sistem penyusunan program penyuluhan yang sejalan dan terpadu pada semua tingkatan struktur pemerintahan yaitu tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karena itu dibentuk lembaga penyuluhan pada semua tingkat sebagai salah satu upaya dalam rangka koordinasi terpadu pelaksanaan penyuluhan di Indonesia.

Penyusunan program dari tingkat desa, pada dasarnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan partisipasi aktif dari pelaku utama yaitu petani dan pelaku usaha serta didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan. Harapannya bisa diperoleh dokumen perencanaan penyuluhan atau program penyuluhan desa yang berbasiskan pada kondisi alam daerah, potensi wilayah dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaku utama (petani) dan pelaku usaha yang ada di desa tersebut. Dokumen program penyuluhan desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan program penyuluhan di tingkat kecamatan dan diharapkan pula menjadi dasar dalam rencana pembangunan tingkat desa.

Pola yang hampir sama dilakukan dalam kegiatan penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang disusun oleh penyuluh melibatkan juga perwakilan petani dari desa-desa yang berada di wilayah kecamatan tersebut. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang tidak bisa dilaksanakan pada tingkat desa, diusulkan untuk dilaksanakan di tingkat kecamatan. Dokumen program penyuluhan kecamatan menjadi dasar dalam penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten. selain itu dokumen program penyuluhan tingkat kecamatan menjadi dasar usulan kegiatan rencana pembangunan kecamatan.

Penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten selain harus mengacu pada kebijakan program penyuluhan tingkat provinsi sesuai dengan amant UU SP3K no. 16 Tahun 2006, juga mengacu pada program penyuluhan tingkat kecamatan. Dokumen

programa penyuluhan tingkat kabupaten akan menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja penyuluh ahli di tingkat kabupaten dan menjadi salah satu dasar bagi lembaga penyuluhan tingkat kabupaten ini dalam rencana pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu perlu dilihat kaitan program penyuluhan kabupaten dengan rencana kerja (Renja) sektor pertanian, yaitu BPPKP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan perkebunan dan kehutanan dan Dinas peternakan Perikanan.

Programa penyuluhan yang disusun setiap tahun mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat diharapkan akan menjadi suatu program yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan wilayah, dan rencana pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

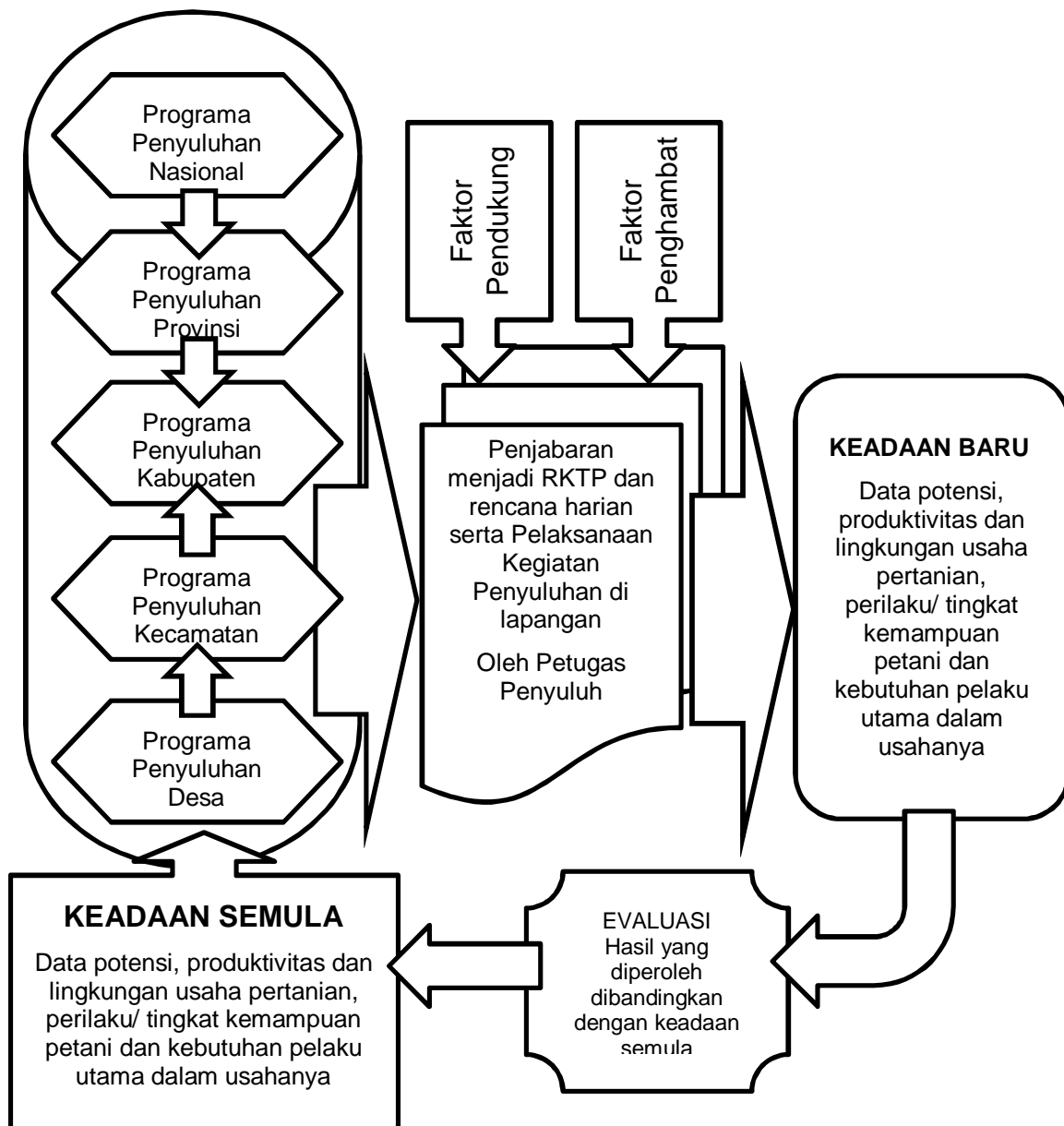
Untuk menggali lebih jauh bagaimana mekanisme perencanaan program penyuluhan pertanian ini berjalan maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai alur perencanaan program penyuluhan yang ada pada berbagai tingkatan yaitu tingkat desa, kecamatan, kabupaten serta keterkaitan dengan program penyuluhan tingkat provinsi.

Programa penyuluhan yang telah disahkan pada masing-masing tingkat wilayah, menjadi dasar bagi penyuluh untuk menyusun rencana kegiatan penyuluh dalam satu tahun ke depan yang disebut Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP). RKTP yang disusun oleh penyuluh setiap bulannya dijabarkan menjadi rencana kerja harian penyuluh dan

untuk selanjutnya pelaksanaan tugas penyuluh secara teknis akan dilakukan dengan berpedoman pada rencana kerja harian tersebut.

Hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penyuluh dan dibandingkan dengan rencana dan keadaan semula, selanjutnya mulai kembali dengan keadaan yang baru. Evaluasi penilaian perubahan yang terjadi pada perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dan dengan mengukur perubahan tingkat produksi dan produktivitas petani, tingkat adopsi teknologi dan perubahan dalam berusahatani. Hasil evaluasi ini dan dengan melihat perkembangan yang ada di wilayah kerja penyuluh merupakan dasar bagi penyusunan program penyuluhan tahun berikutnya.

Siklus yang berlangsung setiap tahun dalam sistem penyusunan program penyuluhan mulai tingkat desa sampai pusat yang terintegrasi dengan sektor pembangunan wilayah, merupakan satu solusi untuk mencapai tujuan akhir dari program penyuluhan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan dukungan peningkatan kesejahteraan petani yang lebih baik.



Gambar 5. Kerangka pikir penelitian